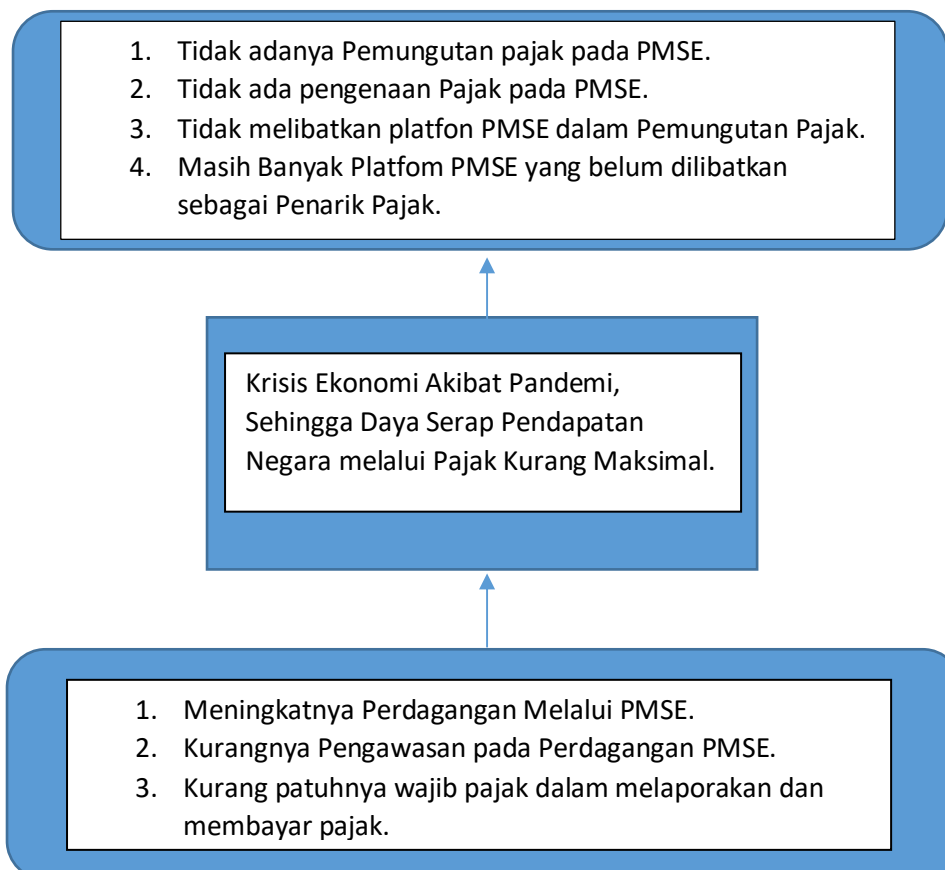


1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP kali ini. Keempat perusahaan tersebut adalah, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. Keempatnya bergabung dengan Netflix, Facebook, Tiktok hingga Shopee CS yang terlebih dahulu ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN.

Penggunaan PMSE merujuk pada perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020. Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terdapat keterangan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut Pelaku Usaha PMSE) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.



Dari penjabaran melalui diagram diatas dapat kita jelaskan bahwa krisis ekonomi akibat dari pandemi berdampak langsung pada pendapatan negara dari sektor pajak. Ditengah adanya pandemi tersebut berdampak pada peningkatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga pemerintah perlu melakukan pemungutan pajak dan memperhatikan lebih PMSE dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak dengan melibatkan PMSE untuk melakukan penarikan pajak. Sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan PMSE melalui pengawasan wajib pajak dan mematuhi pelaporan pajak untuk memaksimalkan stabilitas perekonomian.

2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

Kasus A

Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Padahal tidak semua aplikasi dapat digunakan anak-anak dan remaja. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya pada saat mereka mendaftarkan diri pada suatu aplikasi atau platform media apapun, sejatinya telah terjadi suatu pengikatan diri antara masyarakat dengan penyedia platform atau aplikasi tersebut melalui suatu kontrak elektronik yang bersifat baku. Kontrak ini disebut dengan *End User License Agreement* (EULA) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.

Dari kasus di atas tentang lebih dari 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia sebagai pengguna internet yang tidak semua penyedia platform digital yang diakses diperuntukkan untuk anak-anak maupun remaja. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Terutama mendorong anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik.

Tetapi, dampak baik positif maupun negatif harus benar-benar dipertimbangkan agar keseimbangan tetap terjaga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa efek negatif dari penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja cukup besar. Efek negatifnya anak bisa menjadi kecanduan, bisa merusak psikis maupun psikologisnya, hilangnya nilai-nilai yang baik bagi anak-anak maupun remaja. Oleh karena itu, perumusan masalah dari suatu kebijakan terhadap hal tersebut mesti ditentukan secara komprehensif, mendalam dan berkesinambungan dan berbasis data, sehingga dapat diperoleh apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan dan penyusunan model terutama dalam Forecasting atau Peramalan terhadap suatu fenomena dimana metode ini merupakan analisis kebijakan yang menghasilkan informasi faktual tentang keadaan masa depan dari masyarakat berdasarkan informasi awal tentang masalah kebijakan. Pembatasan usia dalam mengakses situs atau aplikasi tertentu bisa

menjadi pilihan kebijakan dalam mengurangi efek negatif bagi anak dan remaja sebagai pengguna aplikasi/platform. Dalam melakukan forecasting akan difokuskan pada proyeksi yaitu kecenderungan masa sekarang dengan masa depan, yang mana anak-anak atau remaja merupakan aset generasi penerus bangsa yang harus dijaga perkembangannya.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) aturan tersebut seperti yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya bagi ASN, TNI, dan Polri.

Pada 15 April 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 938 pengaduan pengabaian THR keagamaan. Jumlah perusahaan yang melanggar tercatat ada 669. Pada 17 April 2023, jumlah pengaduan meningkat jadi 1.394 kasus dengan total 992 perusahaan. Dari jumlah aduan itu, total pengaduan yang telah ditindaklanjuti 36 aduan atau hanya 2,5 persen. Pengaduan tersebut masuk melalui Posko THR Kemenaker yang mengintegrasikan posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui laman poskothr.kemnaker.go.id.

Upaya pemerintah menindaklanjuti pengaduan pengabaian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dinilai belum maksimal. Besarnya jumlah laporan yang masuk relatif belum diikuti aksi cepat untuk tindak lanjut. Padahal, pelanggaran THR selalu terjadi setiap tahun. Pemerintah harus memetakan kondisi setiap perusahaan untuk mengetahui realitas kondisi keuangan, integrasi kanal pengaduan, dan pemberian sanksi kepada perusahaan dengan kinerja bagus tetapi sengaja mengabaikan THR dengan begitu pemerintah bisa mencegah dan tahu apa yang harus dilakukan dengan mendapatkan perhatian khusus agar penanganan bisa lebih maksimal.